

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dalam pengelolaan data dan pelaporan administrasi di Polda Sumatera Barat, serta merujuk pada lima rumusan masalah yang telah diajukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:



Pertama, implementasi sistem ERP di Polda Sumatera Barat telah membawa perubahan signifikan terhadap efisiensi pengelolaan data dan pelaporan administrasi. Sebelum penerapan ERP, proses administrasi berjalan secara manual dan tidak terintegrasi, yang menyebabkan proses menjadi lambat, rawan kesalahan, serta sulit dalam pelacakan informasi. Setelah ERP diterapkan, setiap proses administratif mulai dari input data, validasi, hingga pembuatan laporan dapat dilakukan secara digital, terpusat, dan real-time. Hal ini memungkinkan penghematan waktu, percepatan proses kerja, serta pengurangan beban administratif yang selama ini menghambat efektivitas pelayanan di lingkungan Polda.

Kedua, manfaat penerapan sistem ERP terhadap kinerja administrasi sangat terasa di berbagai aspek kerja di Polda Sumatera Barat. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan akurasi dan konsistensi data, karena data hanya dimasukkan satu kali dan dapat digunakan lintas unit kerja. Selain itu, sistem ERP mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses kapan saja. Manfaat

lainnya adalah peningkatan koordinasi antarbagian, pelacakan histori administrasi yang lebih mudah, serta terbentuknya alur kerja yang terdokumentasi dengan baik.

Ketiga, integrasi sistem ERP ke dalam aplikasi E-DUMAS secara nyata mampu meningkatkan transparansi dalam proses administrasi dan pelayanan publik di lingkungan kepolisian. Sebelumnya, pelaporan pengaduan masyarakat dilakukan secara konvensional dan sering kali mengalami hambatan dalam pemrosesan serta tindak lanjut. Dengan ERP, proses pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi E-DUMAS langsung tercatat, terklasifikasi, dan didistribusikan secara otomatis ke unit yang berwenang. Pelapor pun dapat memantau status pengaduannya secara langsung. Hal ini menciptakan sistem pelayanan yang lebih terbuka, akuntabel, serta bebas dari potensi manipulasi atau intervensi pihak-pihak yang tidak berwenang.

Keempat, dalam implementasi sistem ERP, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang perlu menjadi perhatian. Beberapa hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya infrastruktur teknologi di beberapa satuan kerja, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, serta resistensi budaya kerja terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital. Selain itu, tidak semua personel secara langsung memahami potensi besar ERP dalam mendukung tugas dan fungsi kepolisian, sehingga terjadi kesenjangan dalam pemanfaatan fitur-fitur yang tersedia.

Kelima, dibutuhkan langkah strategis berupa saran dan kebijakan yang berkelanjutan guna mengatasi kendala tersebut dan mengoptimalkan pengelolaan administrasi melalui ERP di masa depan. Implementasi ERP harus

dilihat sebagai investasi jangka panjang yang memerlukan komitmen institusional, pengembangan kapasitas internal, serta penguatan koordinasi antarbagian agar sistem berjalan efektif dan berkelanjutan. Jika diterapkan secara konsisten, sistem ERP dapat menjadi pilar utama dalam reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola yang profesional, modern, dan transparan di lingkungan Polda Sumatera Barat.

5.2 Saran bagi Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Untuk mendukung optimalisasi implementasi sistem ERP dan menjawab tantangan-tantangan yang telah diidentifikasi, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, peningkatan dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi di seluruh unit kerja Polda Sumatera Barat perlu menjadi prioritas utama. Sistem ERP membutuhkan dukungan infrastruktur yang stabil, seperti jaringan internet cepat, perangkat komputer yang memadai, serta sistem keamanan data yang andal. Tanpa dukungan infrastruktur yang merata, pelaksanaan ERP hanya akan efektif di sebagian kecil unit dan gagal menciptakan integrasi yang utuh.

Kedua, pengembangan kompetensi sumber daya manusia harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis, workshop, dan pendampingan langsung di lapangan. Setiap pegawai yang terlibat dalam pengelolaan data dan administrasi perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang sistem ERP agar tidak terjadi kesalahan input, kesenjangan penggunaan sistem, maupun ketergantungan pada pihak eksternal.

Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh dan perubahan pendekatan budaya kerja yang mendukung digitalisasi administrasi. Budaya kerja yang

masih terbiasa dengan sistem manual perlu diarahkan secara bertahap untuk menerima sistem baru yang lebih efisien. Pimpinan Polda perlu memberikan teladan serta dorongan moral agar seluruh personel mendukung perubahan ini.

Keempat, evaluasi dan pengembangan sistem ERP secara berkala sangat diperlukan guna menyesuaikan sistem dengan dinamika organisasi. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei pengguna, audit sistem, serta pemantauan kinerja sistem berdasarkan indikator tertentu. Dari hasil evaluasi, tim pengembang dapat melakukan penyempurnaan fitur dan memastikan sistem selalu sesuai dengan kebutuhan operasional.

Kelima, penguatan integrasi antara sistem ERP dan aplikasi lain seperti E-DUMAS harus terus dilanjutkan dan dikembangkan. ERP tidak hanya digunakan untuk data internal, tetapi juga harus menjadi platform utama dalam mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan partisipatif.

Keenam, penyusunan kebijakan internal dan regulasi yang jelas mengenai penggunaan ERP sangat penting untuk memastikan standar operasional yang seragam. Kebijakan ini mencakup prosedur penggunaan sistem, pembagian tanggung jawab, alur pelaporan, serta sanksi atas penyalahgunaan sistem.

Ketujuh, diperlukan dukungan dari pimpinan organisasi untuk menjadikan ERP sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi dan agenda Polri Presisi. Komitmen dari pimpinan tidak hanya dalam bentuk instruksi, tetapi juga dukungan anggaran, pengawasan, serta keterlibatan langsung dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data dari ERP.

5.3 Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini, fokus implementasi sistem ERP masih terbatas pada

aspek administrasi internal di Polda Sumbar. Oleh karena itu, untuk pengembangan penelitian selanjutnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perluasan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian mendatang diharapkan dapat mencakup lebih banyak unit atau satuan kerja dalam struktur kepolisian, seperti bidang keuangan, SDM, logistik, maupun pelayanan publik. Hal ini penting untuk melihat efektivitas sistem ERP secara menyeluruh dalam skala organisasi yang lebih luas.

2. Evaluasi Dampak Jangka Panjang

Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi dampak jangka panjang implementasi ERP, misalnya terhadap efisiensi biaya operasional, peningkatan kualitas layanan publik, atau kepuasan internal personel terhadap sistem informasi yang digunakan.

3. Studi Perbandingan Antar Instansi

Peneliti berikutnya juga dapat melakukan studi komparatif antara penerapan ERP di lingkungan kepolisian dengan instansi pemerintah atau lembaga lain yang telah mengimplementasikan sistem serupa. Ini akan memberikan perspektif lebih luas mengenai best practice dan potensi pengembangan sistem lebih lanjut.

4. Integrasi dengan Sistem Layanan Publik Digital

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang mengeksplorasi integrasi ERP dengan platform digital pelayanan publik lainnya seperti e-Dumas, SP2HP Online, atau aplikasi pelayanan berbasis mobile. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem yang terintegrasi secara end-to-end dalam

lingkungan kepolisian.

5. Analisis Risiko dan Keamanan Data

Mengingat pentingnya data yang dikelola dalam sistem ERP, penelitian mendatang sebaiknya juga meneliti aspek keamanan informasi, potensi risiko kebocoran data, serta strategi mitigasi untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data.

6. Penerapan Teknologi Pendukung Lainnya

Penggabungan ERP dengan teknologi terkini seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data dapat dijadikan topik penelitian yang menarik dan relevan dengan arah transformasi digital di sektor pemerintahan dan keamanan.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Dalam proses pelaksanaan tugas akhir ini, penulis menyadari adanya beberapa keterbatasan yang mungkin memengaruhi cakupan hasil penelitian. Salah satu keterbatasan utama adalah waktu penelitian yang relatif singkat, sehingga proses implementasi sistem ERP belum bisa dilakukan secara menyeluruh pada seluruh unit di Polda Sumbar. Fokus implementasi lebih diarahkan pada bagian administrasi utama sebagai studi kasus awal.

Selain itu, keterbatasan lainnya adalah keterbatasan dalam akses terhadap beberapa data internal yang bersifat sensitif dan terbatas bagi pihak luar. Hal ini menyebabkan beberapa aspek evaluasi sistem tidak dapat diuji secara menyeluruh, terutama terkait data kepegawaian dan laporan keuangan yang bersifat rahasia.

Keterbatasan kemampuan teknis dan dukungan SDM dalam pengujian

sistem secara luas juga menjadi tantangan tersendiri. Namun, hal ini tidak mengurangi nilai dari penelitian ini, melainkan menjadi masukan penting untuk pengembangan selanjutnya.

5.5 Rencana Pengembangan ke Depan

Sebagai bagian dari upaya kesinambungan dan pengembangan sistem ERP di Polda Sumbar, terdapat beberapa hal yang perlu direncanakan untuk masa mendatang:

1. Skalabilitas Implementasi

Rencana ke depan adalah memperluas implementasi sistem ERP tidak hanya pada unit administrasi pusat, tetapi juga pada seluruh satuan dan bagian di lingkungan Polda Sumbar, termasuk Polres dan Polsek. Dengan begitu, sistem ini dapat menciptakan integrasi data yang lebih luas dan efisien.

2. Integrasi Antar Sistem

Perlu dikembangkan integrasi sistem ERP dengan aplikasi pelayanan publik lainnya seperti SP2HP Online, E-Dumas, dan Dumas Presisi agar tercipta sistem informasi kepolisian yang lebih terhubung dan mendukung transformasi digital Polri secara menyeluruh.

3. Pengembangan Layanan Berbasis Mobile

Untuk meningkatkan aksesibilitas, pengembangan aplikasi ERP versi mobile juga menjadi langkah strategis agar pengguna dapat mengakses sistem kapan pun dan di mana pun, terutama bagi personel yang bertugas di lapangan.

4. Kolaborasi dengan Pengembang Profesional

Ke depan, pengembangan sistem dapat melibatkan kolaborasi antara pihak internal dengan pengembang perangkat lunak profesional untuk menghasilkan sistem yang lebih stabil, responsif, dan mudah di-maintain dalam jangka panjang.

